



**PROGRAM  
SINERGI PEMBERDAYAAN POTENSI  
MASYARAKAT (SIBERMAS)**



**LAPORAN AKHIR TAHUN-1**

**Judul**

**PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS NAGARI DAN POTENSI  
TANAH ULAYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Oleh**

**Dr.Ir. Yuzirwan, M.S  
(NIP 130816272 / Ketua Tim)**

**Dr. Erwin, M.Si  
(NIP 131811057 / Anggota Tim)**

**Ir. Retno Dewi, M.Si  
(NIP 132215038 / Anggota Tim)**

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
Padang, Oktober 2008**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana keluarga sebagai entitas komunitas manusia di suatu kawasan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk dapat hidup secara normal dan wajar karena ada keterbatasannya untuk memperoleh kecukupan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), memperoleh layanan pendidikan dasar, kesehatan, serta memperoleh fasilitas infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi). Penampakan kemiskinan itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan rupa, seperti ; kelaparan dan gizi buruk dengan berbagai rupa dampaknya terhadap kesehatan, kemudian keterbelakangan, kebodohan, pengangguran, pendapatan rendah, kemunduran sikap mental dan perilaku, keburukan lingkungan dan sanitasi keluarga, dan sebagainya.

Dampak kemiskinan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan wilayah karena berkaitan erat dengan produktifitas sumberdaya manusia dan etos kerja. Implikasinya adalah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan. Kawasan dimana masyarakatnya miskin akan rentan terhadap huru hara dan kegaduhan serta sumberdaya hutannya akan terancam rusak karena penebangan liar merajalela. Hal ini terbukti, begitu illegal logging diberantas oleh satuan pengamanan hutan maka jumlah keluarga miskin bertambah secara drastis. Karena begitu besarnya dampak kemiskinan, maka pemerintah menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas utama pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu.

Menurut kajian Bank Dunia (2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia ; pertama, kemiskinan yang berkaitan dengan rendahnya pendapatan keluarga ; kedua, kemiskinan yang berkaitan dengan rendahnya akses keluarga untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan, kecukupan layanan pendidikan, kecukupan layanan kesehatan, serta kecukupan ketersediaan

## IV. HASIL KEGIATAN SIBERMAS TAHUN-1 (2008)

### 4.1. Kondisi Eksisting Kabupaten Pesisir Selatan

#### 4.1.1. Pemerintahan, Penduduk, Basis Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Barat. Wilayahnya mencakup daratan bagian selatan pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 574,989 Ha yang membentang dari utara ke selatan dengan panjang pantai lebih kurang 218 Km, terletak pada posisi 0° 59' Lintang Selatan sampai dengan 2° 28,6' Lintang Selatan dan 0° 19'-101° 18' Bujur Timur, Pesisir Selatan mempunyai batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kota Padang.
- Sebelah selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Solok Selatan dan Jambi.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu, kabupaten Pesisir Selatan berasal dari *afdeling zuid beneden landen* (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu pada tahun 1903 wilayah Kerajaan Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci dikuasai Belanda, yang lalu menjadi *afdeling* dan dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1956 daerah ini berstatus Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Kerinci (PSK), baru pada tahun 1957 berpisah dengan Kerinci. Kerinci menjadi satu kabupaen dan masuk wilayah propinsi Jambi sedangkan Pesisir Selatan menjadi Kabupaten Pesisir Selatan masuk wilayah Propinsi Sumatera Barat

Sejak UU Nomor 22 tahun 1999 diterbitkan tentang otonomi pemerintahan daerah, sekarang wilayah pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan mencakup 12 kecamatan dan 37 nagari dengan jumlah penduduk serta komoditi unggulannya adalah seperti tertera pada Tabel 4.1. Nagari menjadi wilayah pemerintahan

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan Tahun-1 SIBERMAS dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Jumlah penduduk kabupaten Pesisir Selatan 423.182 jiwa atau 103.999 Kepala Keluarga, tersebar di 37 Nagari yang merupakan wilayah adat dan sekaligus menjadi wilayah administrasi pemerintahan, terdiri dari KK miskin, KK sangat miskin, dan KK hampir miskin.
- (2) KK sangat miskin berjumlah 4.962 KK (4,8%), yaitu KK yang mempunyai; Lahan garapan < 0,5 ha hak pakai kaum ; Rumah sangat sempit (luas < 21 m<sup>2</sup>, lantai tanah/papan, atap rumbia-seng, dinding bambu/papan susun); Sanitasi buruk (tidak ada WC & Got, sumber air sungai-sumur gali tdk dibeton); Anggota Keluarga > 7 orang/KK; Kesehatan buruk (kurang gizi – penyakit kulit – penyakit dalam); Pendidikan buruk (tidak sekolah – tamat SD); Sumber Energi (kayu bakar - minyak tanah); pekerjaan tidak tetap-buruh tani; Pendapatan < Rp 500.000/ bulan.
- (3) KK miskin berjumlah 33.518 KK (32,2%), yaitu KK yang mempunyai; Lahan garapan 0,5 - < 1 ha hak pakai kaum ; Rumah sederhana (luas 21 – 36 m<sup>2</sup>, lantai beton cor, atap seng, dinding bata kasar); Sanitasi buruk (tidak ada WC & Got, sumber air sungai-sumur gali tdk dibeton); Anggota Keluarga 5 - 7 orang/KK; Kesehatan buruk (kurang gizi – penyakit kulit- penyakit dalam); Pendidikan buruk (tidak sekolah – tamat SD); Sumber Energi (kayu bakar - minyak tanah); pekerjaan tidak tetap-buruh tani; Pendapatan Rp 500.000 - < Rp 1.000.000/ bulan;
- (4) KK hampir miskin berjumlah 46.176 KK (44,4%), yaitu KK yang mempunyai; Lahan garapan 0,5 – 1 ha hak pakai kaum ; Rumah sangat sederhana (luas 21 – 36 m<sup>2</sup>, lantai beton cor, atap seng, dinding bata plester); Sanitasi buruk (tidak ada WC & Got, sumber air sungai-sumur gali tdk dibeton); Anggota Keluarga 5 -

7 orang/KK; Kesehatan buruk (kurang gizi – penyakit kulit – penyakit dalam); Pendidikan buruk (tidak sekolah – tamat SD – tamat SMP); Sumber Energi (kayu bakar - minyak tanah); pekerjaan tidak tetap-buruh tani; Pendapatan Rp 1000.000 - < Rp 1.500.000/ bulan;

- (5) Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster dari segi produktifitas nagari yaitu ; Klaster A nagari berproduktifitas tinggi dimana hanya < 25% total luas lahan potensialnya yang belum tergarap; Klaster B yaitu nagari dengan produktifitas sedang dimana 25% - < 50% dari total luas potensialnya yang belum tergarap; Klaster C yaitu nagari berproduktifitas rendah, dimana  $\geq 50\%$  total luas lahan potensialnya belum tergarap.
- (6) Semua lahan garapan tersebut adalah lahan (tanah) ulayat dimana kepemilikannya adalah secara komunal. SetiapKK hanya beroleh Hak Pakai yang diberi oleh Penghulu Adatnya. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan berbasis nagari dan potensi Tanah Ulayat haruslah melibatkan pemangku adat, pemerintah nagari, dan satuan kerja pemerintah kabupaten secara bersinergi.

## 6.2. Saran

- (1) Pengentasan Kemiskinan hendaklah berpatokan kepada tipologi kemiskinan dan klaster nagari sehingga memungkinkan dilakukannya konsolidasi lahan dengan adil dan proporsional dengan sistem bagi hasil maupun sewa pakai lahan.
- (2) Pengentasan Kemiskinan harus diarahkan kepada gerakan ekonomi produktif, dimulai dari membentuk kelompok usaha produktif di nagari-nagari, kemudian kelompok ini diwadahkan ke dalam koperasi nagari yang dibentuk oleh tiga unsur yaitu; Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari